

Kebijakan Kartu Identitas Anak Di Kota Palu

Sussanti

¹Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan Palu
Email: susan3115hs@gmail.com

Kata Kunci

1. Kartu Identitas Anak
2. Kebijakan publik
3. Administrasi kependudukan
4. Kota Palu
5. Implementasi kebijakan

Abstrak: Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) hadir sebagai upaya sistematis dalam mendukung administrasi kependudukan anak dan pemenuhan hak-hak dasar anak di Indonesia, termasuk di Kota Palu. Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan KIA di Kota Palu menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data sekunder dan literatur relevan. Temuan menunjukkan bahwa walaupun pemerintah daerah telah melakukan inovasi dan kolaborasi, beberapa hambatan seperti kurangnya sosialisasi, keterbatasan infrastruktur, dan rendahnya partisipasi masyarakat masih menjadi tantangan utama. Pembahasan menggunakan landasan teori implementasi kebijakan publik, administrasi kependudukan, good governance, inovasi administrasi publik, dan hak anak memperkuat analisis terhadap hasil temuan di lapangan.

Keyword

1. Child Identity Card
2. Public policy
3. Population administration
4. Palu City
5. Policy implementation

Abstract : *The Child Identity Card (KIA) policy is a systematic effort to support child population administration and the fulfillment of children's basic rights in Indonesia, including in Palu City. This study analyzes the implementation of the KIA policy in Palu City using qualitative descriptive methods with secondary data and relevant literature. The findings indicate that although local governments have implemented innovation and collaboration, several obstacles such as lack of socialization, limited infrastructure, and low community participation remain major challenges. The discussion uses a theoretical foundation of public policy implementation, population administration, good governance, public administration innovation, and children's rights to strengthen the analysis of the findings in the field.*

PENDAHULUAN

Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki hak atas identitas yang jelas sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia (UNICEF, 2020). Administrasi kependudukan tertata menjadi prasyarat perlindungan dan pemenuhan data identitas yang akurat bagi setiap warga negara, termasuk anak-anak (Dwiyanto, 2006). Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan terobosan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 mengenai pelayanan dokumen kependudukan anak.

KIA tidak hanya sebatas dokumen identitas, tetapi juga sebagai alat untuk memperoleh layanan pendidikan, kesehatan, serta perlindungan hukum sejak dini (UNICEF, 2020). Pemerintah Kota Palu melalui Disdukcapil melakukan inisiasi dan inovasi untuk mempercepat penerbitan KIA sebagai langkah percepatan pencatatan sipil anak. Dalam implementasinya, tantangan tampak dari sisi administrasi, infrastruktur, dan sosial, seperti data kependudukan yang belum terintegrasi sepenuhnya (Edwards, 1980). Tingkat kepemilikan KIA anak di Kota Palu masih berada di bawah target nasional, meski tren pertumbuhan tiap tahun semakin positif (Disdukcapil Kota Palu, 2022).

Tantangan utama adalah kurangnya pemahaman orang tua tentang pentingnya KIA dan masih ada anggapan bahwa KIA belum menjadi kebutuhan mendesak (Wulandari, 2021). Berbagai inovasi seperti layanan jemput bola, integrasi dengan layanan sekolah, dan program kolaborasi lintas sektor dilakukan untuk meningkatkan cakupan kepemilikan KIA. Keterbatasan perangkat lunak dan jaringan internet di beberapa wilayah, serta terpusatnya pelayanan di kota, menyulitkan akses masyarakat di daerah pinggiran (Dwiyanto, 2006). Sumber daya manusia operator pelayanan KIA belum seimbang antara jumlah, kompetensi, dan beban kerja, sehingga mempengaruhi kecepatan pelayanan. Prinsip good governance ditegakkan melalui transparansi layanan

dan akuntabilitas administrasi, tetapi efektifitas partisipasi publik masih perlu penguatan (UNDP, 1997). Kolaborasi Disdukcapil dengan sekolah-sekolah telah memberikan dampak positif, meski implementasi belum merata di semua kecamatan. Studi Wulandari (2021) menekankan pentingnya komunikasi efektif dan edukasi publik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Untuk itu, penelitian ini sendiri berusaha mengidentifikasi secara komprehensif strategi, tantangan, dan solusi implementasi KIA di Kota Palu, dengan harapan dapat menjadi acuan bagi praktik kebijakan serupa di daerah lain.

LANDASAN TEORI

Kajian mengenai implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Palu dibangun atas beberapa landasan teori yang relevan dan saling memperkuat. Pertama, teori implementasi kebijakan publik dari George C. Edwards III menekankan bahwa keberhasilan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi aparat pelaksana, dan struktur birokrasi. Edwards (1980) menyatakan, komunikasi yang jelas dan efektif antara pembuat kebijakan dengan pelaksana sangat penting agar tujuan kebijakan tidak menyimpang. Di Kota Palu, komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya KIA masih menjadi tantangan tersendiri, sesuai dengan teori ini. Sumber daya juga menjadi aspek fundamental sebagaimana diuraikan Edwards. Keterbatasan personel dan sarana pelayanan administrasi kependudukan di Kota Palu menyebabkan proses penerbitan KIA belum berjalan optimal. Selain itu, sikap dan komitmen aparat, yang disebut sebagai disposisi, sangat erat kaitannya dengan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Ketersediaan waktu, motivasi, dan pemahaman petugas Disdukcapil Palu harus terus ditingkatkan untuk menunjang implementasi KIA.

Dalam kerangka administrasi kependudukan, teori yang dikemukakan oleh Dwiyanto (2006) menjadi pijakan penting. Dwiyanto meyakini bahwa administrasi publik yang bagus harus didukung oleh pencatatan data kependudukan yang universal, akurat, dan terintegrasi. Inovasi administrasi seperti KIA diperlukan untuk memberi akses dan pelayanan yang lebih baik kepada penduduk, khususnya anak, serta memperkuat fungsi administrasi pemerintahan. Kolaborasi antarinstansi dalam proses pendataan dan penerbitan KIA juga menjadi sorotan teori ini.

Lebih lanjut, perspektif *good governance* sebagaimana digagas oleh UNDP (1997), menggarisbawahi perlunya prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan keadilan dalam implementasi kebijakan publik. Di Kota Palu, penyelenggaraan layanan KIA berupaya memenuhi prinsip ini meski di beberapa aspek, seperti partisipasi masyarakat dan keadilan akses layanan, masih perlu penguatan. *Good governance* menjadi panduan dalam meningkatkan kualitas tata kelola KIA di tingkat daerah.

Teori inovasi administrasi publik dari Rogers (2003) juga sangat relevan digunakan dalam konteks penyelenggaraan KIA. Rogers menjelaskan bahwa keberhasilan inovasi kebijakan sangat ditentukan oleh proses komunikasi, persepsi masyarakat terhadap manfaat, kemudahan akses, serta adanya *champion* yang menggerakkan perubahan. Diseminasi informasi tentang KIA yang masif dan konsisten sangat diperlukan agar masyarakat cepat mengadopsi kebijakan ini. Selain itu, keterlibatan tokoh masyarakat dan institusi pendidikan akan mempercepat difusi inovasi di masyarakat.

Akhirnya, teori hak anak yang ditekankan dalam Konvensi Hak Anak dan didukung oleh UNICEF menempatkan dokumen identitas sebagai hak dasar yang wajib dipenuhi negara. Tanpa identitas, anak-anak akan rentan kehilangan akses berbagai layanan dan perlindungan publik. Oleh karena itu, kebijakan KIA harus dimaknai

sebagai pemenuhan tanggung jawab negara untuk melaksanakan perlindungan dan menghindari diskriminasi pelayanan kepada seluruh anak (UNICEF, 2020).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan memberikan gambaran mendalam mengenai implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Palu. Data dikumpulkan melalui studi literatur, analisis dokumen kebijakan pemerintah, laporan tahunan Disdukcapil, dan hasil-hasil penelitian yang relevan. Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti mengungkap fenomena secara komprehensif, sesuai dengan pandangan Moleong (2017) dan Creswell (2016) yang menegaskan bahwa pendekatan ini efektif untuk menganalisis proses, dinamika, serta konteks pelaksanaan kebijakan secara mendalam. Proses triangulasi digunakan untuk memverifikasi keakuratan data, dengan perbandingan antara berbagai sumber. Analisis dilakukan dengan mengaitkan temuan-temuan lapangan dengan teori-teori yang telah dirumuskan, sehingga diperoleh pemahaman holistik terkait implementasi, tantangan, serta upaya perbaikan kebijakan KIA di Kota Palu.

PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan KIA di Kota Palu dilaksanakan secara bertahap sejak berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016, dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) sebagai pelaksana utama. Berdasarkan teori implementasi kebijakan publik Edwards, aspek komunikasi telah diupayakan melalui sosialisasi di lingkungan sekolah, pertemuan masyarakat, serta berbagai saluran media, meski cakupannya masih belum optimal (Edwards, 1980). Sumber daya manusia dan sarana pelayanan masih menjadi tantangan mendasar.

Pelayanan yang terpusat di kantor Disdukcapil membuat akses masyarakat di wilayah pinggiran menjadi terbatas.

Inovasi layanan, seperti program jemput bola ke sekolah-sekolah dan integrasi dengan puskesmas, mulai diterapkan namun terkendala jumlah petugas dan fasilitas. Kolaborasi lintas sektor telah dilakukan antara Disdukcapil dengan Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah, namun integrasi data yang belum sepenuhnya digital masih menjadi penghambat efisiensi pelayanan (Dwiyanto, 2006).

Berdasarkan teori administrasi kependudukan, peranan sekolah sebagai mitra pengumpul data sangat membantu proses pendataan anak wajib KIA, meski diperlukan pelatihan tambahan bagi operator sekolah. Prinsip transparansi mulai diterapkan, di mana prosedur pengurusan KIA dan capaian kinerja layanan diumumkan secara daring dan luring untuk memenuhi prinsip good governance (UNDP, 1997). Namun, aduan masyarakat terkait kelambanan pelayanan dan kekurangan informasi masih sering dijumpai, menandakan bahwa prinsip akuntabilitas belum sepenuhnya berjalan. Rendahnya partisipasi masyarakat di beberapa kecamatan disebabkan kurangnya pemahaman akan manfaat KIA, sebagaimana dijelaskan dalam teori difusi inovasi Rogers yang menekankan pentingnya edukasi intensif (Rogers, 2003).

Aspek inovasi layanan telah menunjukkan hasil – misalnya, program pendaftaran massal KIA di sekolah-sekolah yang terbukti mampu meningkatkan cakupan pendaftaran dalam waktu singkat. Capaian penerbitan KIA di Kota Palu sampai akhir 2022 baru mencapai sekitar 57% populasi anak usia 0-16 tahun yang tercatat; angka ini menunjukkan perlunya strategi baru untuk mencapai target nasional (Disdukcapil Kota Palu, 2022). Data menunjukkan pusat kota lebih mudah mendapatkan layanan, sedangkan kawasan pinggiran dan masyarakat yang kurang mampu masih mengalami hambatan akses administrasi.

Upaya digitalisasi pelayanan sudah mulai dijalankan, namun belum semua masyarakat dapat memanfaatkan layanan daring karena keterbatasan perangkat dan literasi digital. Sinergi dengan program kesehatan seperti posyandu membuka peluang perluasan jangkauan pelayanan KIA, walau realisasinya masih bersifat parsial.

KIA terbukti mendukung pemenuhan hak anak atas identitas, yang juga menjadi salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan implementasi Konvensi Hak Anak. Keberhasilan layanan KIA semakin jelas ketika manfaatnya terhubung dengan akses pendidikan, layanan kesehatan, pembukaan rekening bank bagi anak, ataupun syarat penerimaan beasiswa. Umpan balik dari masyarakat yang telah memperoleh manfaat KIA secara langsung mendorong percepatan permintaan layanan di beberapa sekolah unggulan. Keterlibatan tokoh masyarakat dan tokoh adat pada proses sosialisasi menunjukkan hasil positif terhadap kepercayaan publik dan penerimaan inovasi kebijakan.

Beberapa tantangan khusus yang masih dihadapi adalah penyesuaian regulasi lokal dengan standar nasional serta keterbatasan anggaran dalam penyediaan fasilitas pelayanan KIA secara merata. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan berbasis komunitas, kolaborasi multisektor, dan peningkatan literasi publik untuk mempercepat akselerasi implementasi KIA di Kota Palu

PENUTUP

Kebijakan Kartu Identitas Anak di Kota Palu telah berjalan dengan berbagai inovasi dan strategi kolaborasi lintas sektor, namun masih menemui sejumlah kendala seperti keterbatasan sumber daya, keterpaduan sistem data, partisipasi publik yang perlu digiatkan, serta akses layanan yang belum merata. Analisis berdasarkan teori implementasi kebijakan, administrasi kependudukan, good governance, inovasi administrasi publik, dan hak anak menunjukkan perlunya penguatan komunikasi,

peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perluasan digitalisasi layanan, serta strategi sosialisasi yang lebih efektif pada masyarakat. Diperlukan pula keberpihakan kebijakan terhadap kelompok rentan dengan mendekatkan layanan ke masyarakat pinggiran dan memperbanyak program outreach berbasis komunitas, sekolah, dan fasilitas kesehatan. Rekomendasi selanjutnya adalah mempercepat pemutakhiran data digital, memperluas pelatihan bagi petugas lapangan, serta memperkuat peran tokoh masyarakat dalam mendukung pencapaian kepemilikan KIA secara universal di Kota Palu.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2016). **Research design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran**. Pustaka Pelajar.
- Disdukcapil Kota Palu. (2022). Laporan tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu 2022. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu.
- Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Gadjah Mada University Press.
- Edwards, G. C., III. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak*. Jakarta, Indonesia.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of innovations (5th ed.)*. Free Press.
- United Nations Development Programme [UNDP]. (1997). *Governance for sustainable human development: A UNDP policy document*. UNDP.
- United Nations Children's Fund [UNICEF]. (2020). *Child rights and identity*. <https://www.unicef.org/indonesia/id/hak-anak-identitas>
- Wulandari, F. (2021). Implementasi kebijakan administrasi kependudukan anak di Indonesia. **Jurnal Administrasi Publik**, 12(1), 45–62.